



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi



: @Puskajianggaran



: @Puskajianggaran



: [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

Penulis : RC, TR,  
AU



## Perkembangan Realisasi APBN dan APBD (dalam triliun rupiah)



\*) Outlook (APBN) dan Anggaran (APBD)  
Sumber: DJPK dan Nota Keuangan, 2021

Sarah Steingrüber dkk (2021), mengungkapkan bahwa ancaman korupsi pada saat pandemi di negara berkembang jauh lebih berat dibandingkan di negara maju. Banyaknya kebijakan hukum yang melonggarkan atau meringankan guna menangani pandemi, menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.







## Perkembangan Indeks Korupsi

Indonesia

ASEAN



Negara	Peringkat
Timor Timur	40
Malaysia	51
Brunei Darussalam	60
Singapura	85
<b>Indonesia</b>	<b>102</b>

Sumber : Transparency International Indonesia , 2020

Sampai saat ini, kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Data dari Transparency International Indonesia menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 menurun.





## Upaya Pemerintah dalam mencegah Korupsi di masa pandemi



**01** Perlu diketahui bahwa bangsa ini sudah mempersiapkan hukuman yang memberatkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi saat pandemi. Berdasarkan UU No, 31 Tahun 1999 khususnya pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat tertentu dapat dipidana hukuman mati.

**02** Pada awal tahun 2020, Presiden memberikan arahan agar kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, dan lembaga pengawas internal pemerintahan, untuk mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

**03** Di daerah, pemerintah pusat mendorong keterlibatan APIP daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

**04** Dalam rangka memperkuat pengawasan, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 8 Tahun 2020.